

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGAMBILAN
PAKSA JENAZAH PASIEN COVID-19 DI KOTA MAKASSAR**

*Criminological Review of the Crime of Forced Taking of the Bodies of Covid-19 Patients
in Makassar City*

Nurfadilah Kamri*, Ruslan Renggong, Siti Zubaedah

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: dilakamri23@gmail.com

Received : Mei 18, 2023

Accepted : Agustus 01, 2023

Published : Agustus 30, 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pengambilan paksa jenazah Covid-19 dan sikap masyarakat terhadap terjadinya tindak pidana pengambilan paksa jenazah Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan metode pendekatan empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 yakni faktor individu, faktor keluarga, faktor layanan kesehatan, faktor sosial, budaya dan agama. Sikap masyarakat terhadap terjadinya tindak pidana pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 yakni kondisi psikologis yang tidak terkendali dari keluarga jenazah dan nilai budaya yang telah mengakar di masyarakat memicu penolakan pemulasaraan jenazah dengan prosedur Covid-19 yang diperparah dengan praktik di Indonesia dilakukan dengan mandiri dalam masyarakat yang beragam dan dipengaruhi oleh persepsi dan sumber informasi yang kurang tepat. Banyaknya fenomena keluarga pasien Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mengambil paksa jenazah korban tanpa mematuhi protokol kesehatan yang ada di beberapa daerah di Indonesia. Seperti halnya di Kota Makassar terkait kasus pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 telah dilakukan penyidikan dan terdapat beberapa orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam putusan pengadilan Negeri Makassar Nomor: 42/Pid.S/2020/PN.Mks. Hal ini tentunya akan menyebabkan terciptanya pengurangan jaminan juga kepastian hukum, jika para oknum pelaku tidak diproses secara tegas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 di Kota Makassar dan sikap masyarakat terhadap terjadinya tindak pidana pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pengambilan Paksa Jenazah, Covid-19

Abstract

This study aims to find out what factors are the cause of the crime of forcibly taking the bodies of Covid-19 and the attitude of the community towards the crime of forcing the removal of the bodies of Covid-19. The research method used is descriptive analysis with an empirical approach. The data collection technique was carried out by means of a literature study. The results of this study indicate that the factors causing the crime of forcibly taking the bodies of Covid-19 patients are individual factors, family factors, health service factors, social, cultural and religious factors. The public's attitude towards the crime of forcibly taking the bodies of Covid-19 patients, namely the uncontrolled psychological condition of the deceased's family and cultural values that have taken root in society, triggers the rejection of returning the bodies with the Covid-19 procedure which is exacerbated by the practice in Indonesia carried out independently in society diverse and influenced by perceptions and sources of information that are not quite right. There are many phenomena of families of Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19) patients who forcibly take the bodies of victims without complying with existing health protocols in several regions in Indonesia. As is the case in Makassar City, an investigation has been carried out regarding the forced removal of the bodies of Covid-19 patients and several people have been named suspects in the Makassar District Court decision Number: 42/Pid.S/2020/PN.Mks. This of course will lead to the creation of a reduction in guarantees as well as legal certainty, if the unscrupulous perpetrators are not processed strictly. This study aims to identify and analyze the factors that cause the crime of forcibly taking the bodies of Covid-19 patients in Makassar City and the attitude of the community towards the crime of forcing the corpses of Covid-19 patients.

Keywords: Crime, Forced Retrieval of Bodies, Covid-19



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Corona virus Disease 2019 atau Covid-19 merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus yang dinamakan SARS-CoV-2. Covid-19 merupakan penyakit infeksi akut saluran napas. Gejala Covid-19 umumnya ditandai dengan demam, batuk, nafas pendek sakit tenggorokan (Wildanu *et al.*, 2021). Kasus penyakit (Covid-19) pertama kali dilaporkan di Wuhan pada 30 Desember 2019 dengan kematian pasien Covid-19 pertama terjadi tanggal 11 Januari 2020. Penyebaran penyakit ini terjadi sangat cepat, dimulai dari Wuhan, kemudian dilaporkan di Thailand pada 13 Januari 2020, di Jepang pada 15 Januari 2020, dan Korea Selatan tanggal 20 Januari 2020 (Hanafi, 2021). Penyebaran ini terjadi begitu cepat dan menyebar ke berbagai negara sehingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan Covid-19 sebagai pandemik karena telah menyangkut 114 negara di berbagai benua. Per tanggal 31 Juli 2020, tercatat setidaknya ada 17.106.007 kasus di 216 negara dengan 668.910 angka kematian, sedangkan di Indonesia tercatat ada 106.336 kasus dengan angka kematian sebanyak 5.058 kasus.

Penyebaran virus dari orang-ke- orang terjadi terutama melalui kontak langsung antar anggota keluarga atau orang-orang terdekat seperti rekan bisnis. Penyebaran juga bisa melalui udara saat pasien berbicara atau melalui droplets yang tersebar dari seseorang yang terinfeksi ketika batuk atau bersin (Rahman *et al.*, 2022). Selain itu penyebaran juga bisa terjadi saat orang menyentuh suatu benda atau permukaan yang padanya terdapat virus dan kemudian menyentuh mulut, hidung dan/atau matanya menggunakan tangan yang terkontaminasi. Pasien dengan atau tanpa gejala dapat menyebarkan infeksi. Pasien tanpa gejala sangat beresiko menjadi sumber penularan karena pasien yang demikian tidak menunjukkan gejala.

Perbuatan mengambil paksa jenazah pasien Covid-19 dalam ketentuannya seharusnya dapat diklasifikasikan sebagai delik. Mekanisme sanksi untuk pelaku dalam konteks pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 dilakukan berdasarkan ketentuan pasal kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang (Efendi & Susanti, 2021) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 212 *Juncto* Pasal 214 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman penjara maksimal tujuh tahun. Namun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Kekarantinaan Kesehatan yang secara implisit mengatur perihal wabah penyakit jadi dapat diberlakukannya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dalam penyidikan kasus pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 tegasnya Pasal 93 yang menjabarkan bahwa: “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau dipidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pengambilan paksa jenazah Covid-19 dan sikap masyarakat terhadap terjadinya tindak pidana pengambilan paksa jenazah Covid-19.

B. METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif yang berlaku serta yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat (*law in action*) (Fajar & Ahmad, 2020). Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, data yang terkumpul lalu diidentifikasi lalu dianalisa dan ditemukan solusi permasalahannya. Selain itu, Seluruh data yang penulis kumpulkan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif berdasarkan aturan hukum sehingga mampu menghasilkan penafsiran dan kesimpulan yang dapat dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pengambilan Paksa Jenazah Covid-19 di Kota Makassar

Dalam suatu PT, dimana Direksi selaku Organ dari suatu PT memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 UUPT yang berbunyi: Pengambilan secara paksa jenazah pasien Covid-19 di Kota Makassar meskipun sempat dibaluti perdebatan aksi pada akhirnya mampu dihalau oleh tim gabungan TNI-Polri yang mengamankan rumah sakit. Dari hasil inventarisasi pada setiap kejadian pengambilan paksa jenazah Covid-19, secara konteks psikologi-sosial adalah : selain emosi spontan juga terdapat rasa malu dari keluarga karena korban meninggal disebabkan oleh Covid-19 sehingga kematian tersebut dianggap sebagai aib keluarga. Kemudian terdapat pemahaman agama yang rendah bahwasanya jenazah korban Covid-19 apabila telah meninggal dunia tidak akan menularkan penyakit apapun, meskipun Almarhum atau Almarhumah meninggal karena Covid-19

karena dalam ajaran agama Islam menyatakan bahwa diharuskan dimakamkan sebelum masuknya 5 (lima) waktu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ilham selaku Humas Rumah Sakit Dadi Kota Makassar bahwa Pemulasaran jenazah Covid-19 memang diakui bahwa dalam prosesnya dominan memerlukan waktu yang cukup lama dikarenakan petugas pemulasaran mengikuti protokol yang telah ditetapkan oleh peraturan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang dimana tujuannya tidaklah lain agar jenazah tidak menyebarkan virusnya ke orang lain termasuk kepada para tenaga kesehatan dan tenaga pemulasaran jenazah pasien Covid-19.

Penulis berpendapat dalam temuan penelitian ini secara sosiologis-psikologis terdapat ketidakpercayaan sosial di masyarakat kita terhadap peristiwa penyebaran virus Covid-19 ini, kemudian dari perspektif budaya bahwa peran dari tokoh agama serta tokoh masyarakat tidak mampu meredam gejolak pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 karena menganggap hal tersebut sebagai aib, dari perspektif sosialisasi bahwa pemahaman tentang fungsi dan tujuan rekam medis kurang dapat dipahami dibuktikan dengan masih terjadinya pengambilan paksa pasien jenazah Covid-19 pada saat itu. Terakhir dari segi edukasi bahwa mempercayai isu hoax, penulis berpendapat ketidak mampuan institusi di masyarakat terus berkembang padahal diketahui bahwa pemerintah telah berhasil menekan kenaikan penularan Covid-19. Sehingga tindakan yang diperlukan untuk dilakukan adalah antisipasi dari pemerintah, meyakinkan seluruh masyarakat mulai dari peran para pejabat di masing-masing daerah untuk melakukan sosialisasi secara konsisten tentang bahaya dan dampak dari penularan virus Covid-19 yang berdampak pada pasien maupun jenazah dengan melibatkan unsur terdepan pada suatu tugas penanganan Covid-19 yakni Pengurus wilayah pada domisili seperti RT/RW/Kelurahan/Kecamatan, para tokoh agama dan tokoh masyarakat serta merubah paradigma patron menjadi partisipasi aktif dan partisipasi positif.

Sering kali kita jumpai, pemberitaan miris atau sedih mengenai pengambilan secara paksa Covid-19 serta peristiwa pemakaman jenazah, yang telah disesuaikan dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19. Penolakan bukan hanya bisa terjadi oleh pihak keluarga, namun juga warga setempat. Akhirnya tenaga kesehatan yang mengurus jenazah hingga ke liang lahat, kerap menjadi sasaran amuk mereka. Penyampaian informasi mengenai perlakuan terhadap jenazah pasien Covid-19, maupun terhadap pasien yang memiliki gejala kesamaan, diakui memang belum efektif pada masyarakat Indonesia. Oleh karena itu banyak yang berujung protes dan salah paham. Padahal diketahui, bahwa aspek penyebaran virusnya luar biasa. Sebagaimana diketahui, bahwa proses menangani jenazah Covid-19, sesuai dengan adat istiadat kebiasaan di masyarakat kita dan agama, serta melibatkan banyak orang. Jenazah pasien yang memiliki atau terindikasi memiliki gejala Covid-19 masih akan berpotensi menularkan ke orang di sekitarnya. Oleh karena itu prosedur pemakaman, sesuai protokol Covid-19

menjadi keberatan bagi keluarga pasien, sebab keluarga pasien jenazah Covid-19 tidak dapat melihat pasien untuk terakhir kalinya.

Menurut pendapat penulis ada satu kesalahan, fenomena klasik pada masyarakat kita yaitu, isu keagamaan yang mengemuka saat pandemi Covid-19 melanda negara Indonesia. Ada sebagian yang mengatakan hal itu tidak ada, serahkan sepenuhnya pada yang Maha Kuasa. Hingga saat ini, hal seperti itu masih ada sebagian masyarakat kita, maka tidak mengherankan jika tidak ada yang bersedia dilakukan vaksin, bukan karena komorbid tetapi penyebabnya adanya pemahaman yang salah dalam memahami ajaran agama yang sempit. Jadi tidaklah mengherankan, apabila jenazah pasien Covid-19, banyak penolakan atas proses pemulasaran dan pemakamannya oleh sebagai masyarakat dan keluarga. Olehnya itu dimata masyarakat Indonesia, penguburan jenazah serta menjaga nama baik jenazah selama masa berkabung merupakan suatu hal terpenting.

Dengan adanya pandemi tentunya mengharuskan perubahan dalam proses pengurusan jenazah pasien Covid-19. Sehingga membuat kementerian Agama mengeluarkan panduan pengurusan jenazah pasien Covid-19 yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan Juncto Surat Edaran Dirjen P2P Nomor 483 Tahun 2020 tentang Revisi Ke-2 Pedoman Kesiapsiagaan menghadapi infeksi Covid-19 yang membuat beberapa kelompok masyarakat menjadi tidak setuju terhadap pengurusan jenazah pasien Covid-19 sehingga terjadinya fenomena penjemputan paksa. *Mind Mapping* Faktor Penyebab Terjadinya Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Covid-19:

Tabel 1. Faktor yang menjadi Kendala dalam Pengurusan Jenazah Covid-19

Faktor Individu	Faktor Keluarga
<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya informasi mengenai proses pengurusan jenazah pasien Covid-19 dan bahaya penyebaran virusnya Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga kesehatan dan pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya informasi yang diterima pihak keluarga tentang proses pengurusan jenazah Covid-19 dan bahaya penyebaran virusnya Pihak keluarga tidak ingin mendapat stigma buruk oleh masyarakat sekitar
Faktor Layanan Kesehatan	Faktor Sosial, Agama dan Budaya
<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya penyebaran informasi mengenai prosedur pengurusan jenazah Covid-19 dan bahaya penyebaran virus Kurangnya sosialisasi tentang klasifikasi pasien atau kondisi pasien 	<ul style="list-style-type: none"> Stigma buruk terhadap pasien Covid-19 Emosi negatif yang dirasakan masyarakat Pandangan masyarakat terhadap hak-hak jenazah menurut agama.

Sumber: Data Narasumber RSKD Dadi Makassar, 2023

2. Sikap Masyarakat Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Covid-19

Fenomena jemput paksa jenazah Covid-19 lazim terjadi semenjak virus ini mewabah di dunia di beberapa tahun terakhir. Aksi tersebut sebagian besar terjadi dikarenakan keluarga tidak terima atas status anggota keluarganya yang menjadi pasien positif Covid-19 oleh rumah sakit rujukan. Bagi anggota keluarga yang meninggal dunia, mereka meminta proses pemulasaran jenazah dilakukan

berdasarkan keyakinan agama yang dianut tanpa perlu mengikuti protokol penanganan jenazah Covid-19 yang mereka anggap terlalu berlebihan. Dalam melihat fenomena dan sistem kepercayaan, agama memang menempati posisi tersendiri di masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Berger bahwa setiap masyarakat manusia adalah suatu usaha pembangunan dunianya. Agama memiliki tempatnya tersendiri dalam usaha tersebut. Dengan kata lain, Berger ingin menegaskan bahwa dialektika manusia dan masyarakat yakni masyarakat adalah produk manusia begitu pula sebaliknya, manusia merupakan produk dari masyarakat. Sedangkan agama merupakan tatanan superstruktur yang melandasi interaksi dengan komitmen tanpa reserve pada yang Maha Kuasa dan Maha Suci, manusia memelihara masyarakatnya sebagai kumpulan dari manusia yang beriman untuk memelihara manusia yang ada di dalamnya.

Hasil wawancara penulis dengan Burhanuddin, S.H., M.H. bahwa suatu kondisi psikologis yang tidak terkendali dari keluarga jenazah dan nilai budaya yang telah mengakar di masyarakat dalam pemulasaraan jenazah memicu masyarakat untuk menolak pemulasaraan jenazah dengan prosedur Covid-19. Hal tersebut diperparah dengan praktik pemulasaraan jenazah di Indonesia yang dilakukan mandiri dalam masyarakat yang beragam dan dipengaruhi oleh persepsi dan sumber informasi yang kurang tepat. Banyak misinformasi yang tersebar di masyarakat dalam pelaksanaan pemakaman jenazah dengan prosedur Covid-19 di masyarakat. Seperti kepercayaan bahwa masyarakat sekitar pemakaman bisa tertular virus tersebut apabila jenazah pasien Covid-19 dimakamkan dengan protokol di suatu desa. Beliau menambahkan bahwa tokoh ulama sebenarnya dapat berperan krusial dalam mendidik masyarakat tentang cara benar dalam pengurusan jenazah pasien Covid-19 dikarenakan masyarakat Indonesia yang religius dan sangat menghormati para ulama akan muda menerima dan mengikuti informasi yang akurat dari ulama.

Menurut pakar kriminologi Adrianus Meliala bahwa pengambilan paksa jenazah Covid-19 merupakan fenomena sosial yang disebabkan dua faktor yakni konformitas misalnya walaupun dia tidak setuju terhadap suatu hal tetapi karena dia tidak mau terlihat berbeda dengan yang lain, maka dia tetap melakukan hal tersebut. Sederhananya hanya ikut-ikutan. Faktor yang kedua warga telah tahu bahwa tindakannya sudah melanggar norma akan tetapi mereka merasa kebal hukum sehingga mereka berani melakukan tindakan yang melanggar norma tersebut, sekalipun norma-norma tersebut ada kekuatan hukumnya. Tidak hanya itu menurut Adrianus Meliala bahwa warga semacam memiliki keyakinan bahwa dirinya kebal imun, merasa tidak akan mungkin terkena suatu penyakit sehingga melakukan tindakan melanggar norma.

Penulis berpendapat bahwa sebenarnya para tokoh masyarakat mempunyai peran penting terhadap fenomena pengambilan paksa jenazah Covid-19 karena masyarakat cenderung mengikuti arahan tokoh masyarakat yang mempunyai jabatan atau kedudukan di daerah tempat tinggalnya. Masyarakat akan

mengikuti seseorang yang mempunyai pengaruh atau peran besar di daerahnya. Dengan semangat konformitas mungkin terhadap kasus ini yang pertama menyuarkan penjemputan paksa bisa jadi tokoh di lingkungan masyarakat tersebut sehingga diikuti oleh warga lain, karena menurut pendapat penulis apabila bukan orang yang berperan di lingkungan tersebut maka cenderung tidak akan diikuti. Disisi lain berdasarkan wawancara penulis dengan Zahid Bushran, S.H. masyarakat yang menyoroti tindakan pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19, berpendapat bahwa seharusnya pada saat itu pelibatan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, budayawan, sosiolog, antropolog dalam komunikasi publik harus secara nyata dilibatkan sehingga tidak terjadi kembali pengambilan paksa jenazah yang terkena virus Covid-19 oleh keluarga atau masyarakat sekitarnya. Karena apabila terjadi komunikasi publik yang baik dari masyarakat maka peristiwa pengambilan paksa jenazah Covid-19 tersebut tidak akan terjadi lagi.

Salah satu contoh sanksi sosial yang sangat menyakitkan dirasakan oleh Andi Baso yang menyatakan bahwa keluarganya mendapat perlakuan tidak adil dikarenakan dengan status PDP yang disematkan kepada sang istri, keluarganya mendapat sanksi sosial yang menyakitkan. Ketika orang terdekat meninggal dan tidak ada satupun keluarga yang datang karena berstatus PDP. Lebih lanjut Psikolog Sosial Sunu Bagaskara menjelaskan bahwa fenomena pengambilan paksa jenazah Covid-19 mencerminkan emosi negatif masyarakat di tengah ketidakpastian pandemi Covid-19 sehingga oknum tersebut cenderung mengambil tindakan berisiko. Alasan mengapa orang-orang mengambil paksa jenazah kerabatnya salah satunya karena mereka panik dan syok atas keadaan yang terjadi terlebih lagi belum ada kepastian apakah jenazah itu positif atau negatif Covid-19. Kebiasaan yang berhubungan dengan budaya dan agama, apalagi warga di berbagai daerah memiliki patokan agama dan budaya dalam memperlakukan orang yang telah meninggal. Beliau juga memandang masih banyak masyarakat yang menyangkal bahaya virus Covid-19 sehingga menolak mempercayai anggota keluarganya meninggal karena virus mematikan tersebut.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 adalah faktor individu : kurangnya informasi yang diterima terkait prosedur pengurusan jenazah pasien Covid-19 dan bahaya penyebaran virus melalui jenazah tersebut, faktor keluarga : pihak keluarga kurang menerima informasi terkait prosedur dan bahaya dari penularan virus Covid-19, faktor layanan kesehatan : petugas kesehatan dan pemerintah kurang aktif dalam melakukan penyebaran informasi tentang prosedur pengurusan jenazah Covid-19 serta dampaknya sehingga masyarakat kurang paham terkait hal tersebut, selain itu kurangnya sosialisasi tentang kondisi pasien yang menyebabkan masalah komunikasi kurang baik dan membuat kepercayaan masyarakat menurun dan melakukan hal berisiko,

faktor sosial, budaya dan agama : pandangan buruk dan emosi negatif yang dirasakan masyarakat akibat ketidak pastian serta ritual penguburan secara tradisional membuat masyarakat merasa bahwa hak mereka telah dilanggar oleh pemeirntah dan memicu pengambilan paksa jenazah. Sikap masyarakat terhadap terjadinya tindak pidana pengambilan paksa jenazah Covid-19, kondisi psikologis yang tidak terkendali dari keluarga jenazah dan nilai budaya yang telah mengakar di masyarakat dalam pemulasaraan jenazah memicu masyarakat untuk menolak pemulasaraan jenazah dengan prosedur Covid-19 diperparah dengan praktik pemulasaraan jenazah di Indonesia yang dilakukan mandiri dalam masyarakat yang beragam dan dipengaruhi oleh persepsi dan sumber informasi yang kurang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayomi Amindoni, 11 Juni 2020, “Pengambilan paksa jenazah PDP Covid-19: ‘Bisa dibayangkan bagaimana sakitnya sanksi sosial yang kami dapatkan’”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53009450>, diakses pada 4 Februari 2023, Pukul 12.55 WITA.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Efendi A, Susanti D.O, 2021, *Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta
- Eka Wildanu, Agus Rianto, Dikhorir Afnan, *COVID-19 : Stigma Sosial Di Masyarakat*, Jurnal Soshum Insentif, Vol. 4, Nomor 1 Tahun 2021.
- Rahman, A., Hasan, Y. A., & Makkawaru, Z. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Perilaku Pegawai dan Calo Tentang Pungutan Liar*.
- Rifa Yusya Adilah, 7 Juli 2020, “Faktor Warga Mengambil Paksa Jenazah Covid-19”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/faktor-warga-mengambil-paksa-jenazah-covid-19.html>, diakses pada 4 Februari 2023, Pukul 12.19 WITA.
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Pranadamedia Group, Jakarta.
- Suteki, dan Galang Taufani. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta
- Yusuf Hanafi, dkk, 2020, *Pandemi COVID-19: Respon Muslim Dalam Kehidupan Sosial- Keagamaan dan Pendidikan*, Delta Pijak Khatulistiwa, Sidoarjo.
- Zubaedah, Siti; Tira, Andi; Almusawir, Almusawir. *Implementation of Diversion on Examining the Process of Children in Conflict with the Law*. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, [S.l.], v. 11, n. 1, p. 221-236, jan.2023.